

Sinergi DPD-RI dan Pemda Dalam Penyusunan APBD Pro-Rakyat

Diskusi Terbatas

DPD-RI di Provinsi DI Yogyakarta

30 Juli 2015

Wahyudi Kumorotomo, PhD
Magister Administrasi Publik
Universitas Gadjah Mada

www.kumoro.staff.ugm.ac.id

Agenda Paparan

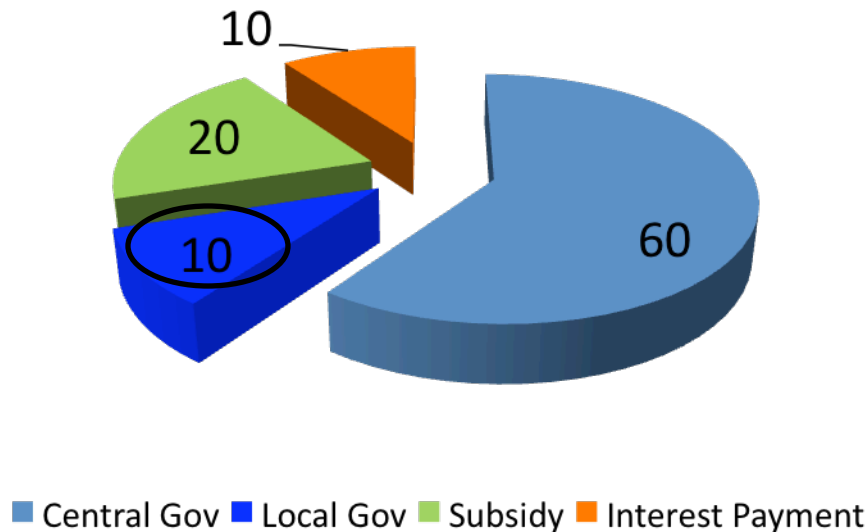
1. Penganggaran sebagai proses kebijakan yg strategis
2. Rendahnya peran anggaran publik
3. APBN dan APBD: Masalah siklus dan struktur belanja
4. Peran strategis DPD bagi APBD Pro-Rakyat: Optimalisasi Serapan & Penajaman Prioritas Belanja.

PROSES KEBIJAKAN (Jones, 1984)

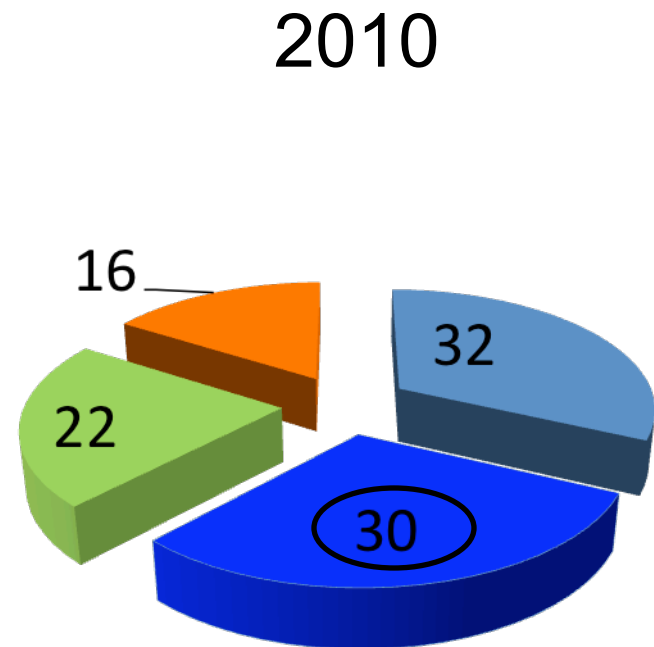
Kegiatan	Kategori	Produk
Persepsi Agregasi Organisasi Representasi Penyusunan agenda	Masukan masalah ke pemerintah	Masalah Tuntutan (demand) Akses Prioritas
Formulasi Legitimasi Penganggaran	Tindakan dari pemerintah	Proposal Program Anggaran
Implementasi	Tanggapan teknis pemerintah thd masalah	Layanan Pembayaran Kemudahan Pengawasan
Evaluasi Penyesuaian "Terminasi"	Masukan program ke pemerintah	Justifikasi Rekomendasi Perubahan Solusi

Dari APBN ke APBD

Desentralisasi Fiskal telah mengalihkan sebagian sumber dana publik dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah. Apakah ini sudah efektif?



2000



2010

Central Gov Local Gov Subsidy Interest Payment

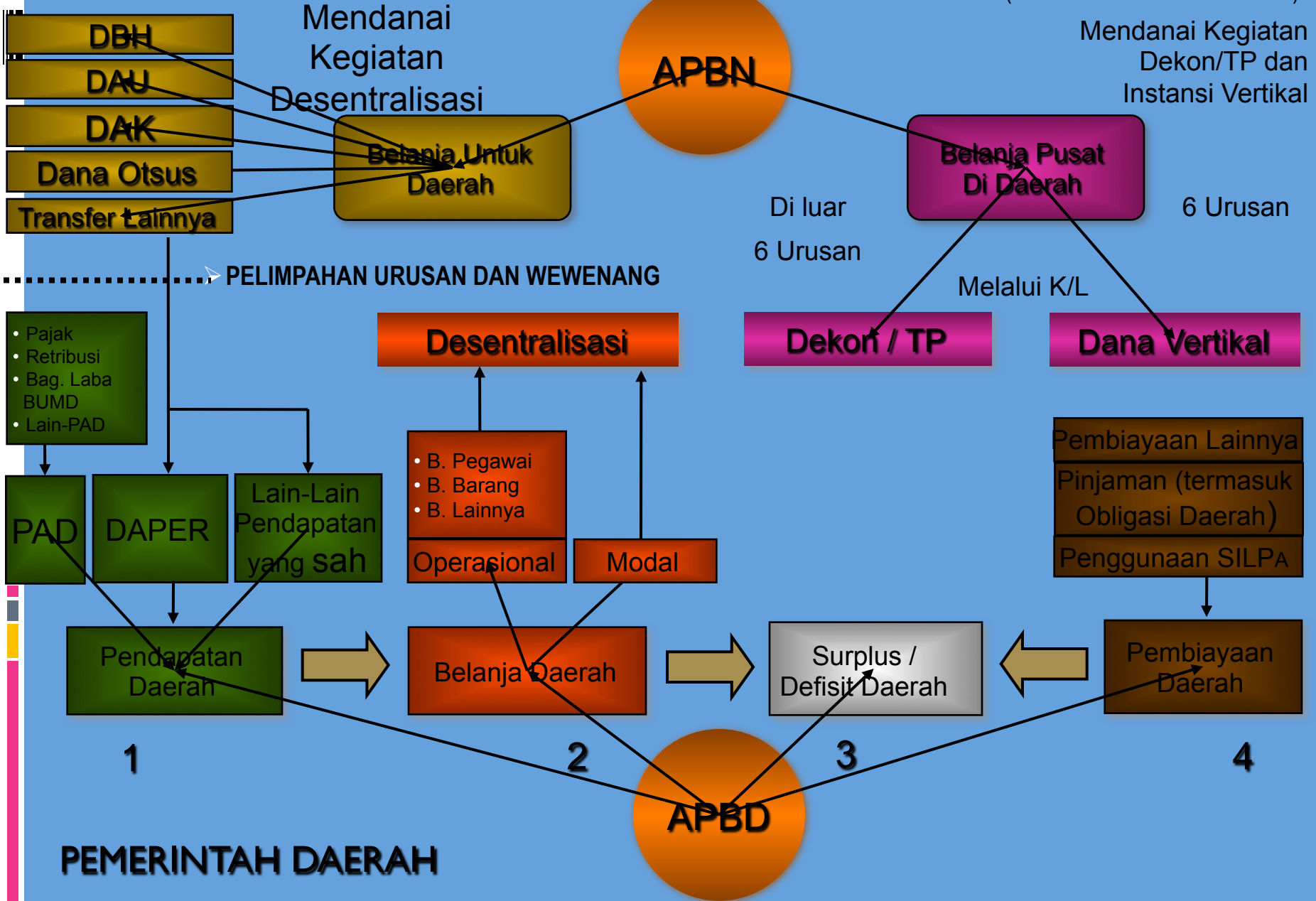
Postur APBN

URAIAN	2014	2015
	APBNP	RAPBN
A. PENDAPATAN NEGARA	1.635.378,5	1.762.296,0
I. PENDAPATAN DALAM NEGERI	1.633.053,4	1.758.864,2
1. Penerimaan Perpajakan	1.246.107,0	1.370.827,2
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	386.946,4	388.037,0
II. PENERIMAAN HIBAH	2.325,1	3.431,8
B. BELANJA NEGARA	1.876.872,8	2.019.868,3
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.280.368,6	1.379.875,3
1. Belanja Kementerian Negara/Lembaga	602.292,0	600.581,7
2. Belanja Non-Kementerian Negara/Lembaga	678.076,6	779.293,6
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	596.504,2	639.993,0
A. Transfer ke Daerah	596.504,2	630.926,8
B. Dana Desa	0,0	9.066,2
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(106.041,1)	(103.532,9)
D. SURPLUS DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(241.494,3)	(257.572,3)
<i>% Defisit terhadap PDB</i>	(2,40)	(2,32)
E. PEMBIAYAAN (I + II)	241.494,3	257.572,3
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	254.932,0	281.387,3
1. Perbankan Dalam Negeri	5.398,5	4.717,5
2. Non-Perbankan Dalam Negeri	249.533,5	276.669,8
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(13.437,7)	(23.815,0)
1. Penarikan Pinjaman LN (bruto)	54.129,6	47.037,1
2. Penerusan Pinjaman (SLA)	(3.407,4)	(4.319,4)
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(64.159,9)	(66.532,8)
- Pertumbuhan ekonomi (%)	5,5	5,6
- Inflasi (%) y-o-y	5,3	4,4
- Tingkat bunga SPN 3 bulan (%)	6,0	6,2
- Nilai tukar (Rp/US\$1)	11.600	11.900
- Harga minyak (US\$/barel)	105	105
- Lifting Minyak (ribu barel/hari)	818	845
- Lifting Gas (MBOEPD)	1.224	1.248

PEMERINTAH PUSAT

POLA HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT-DAERAH

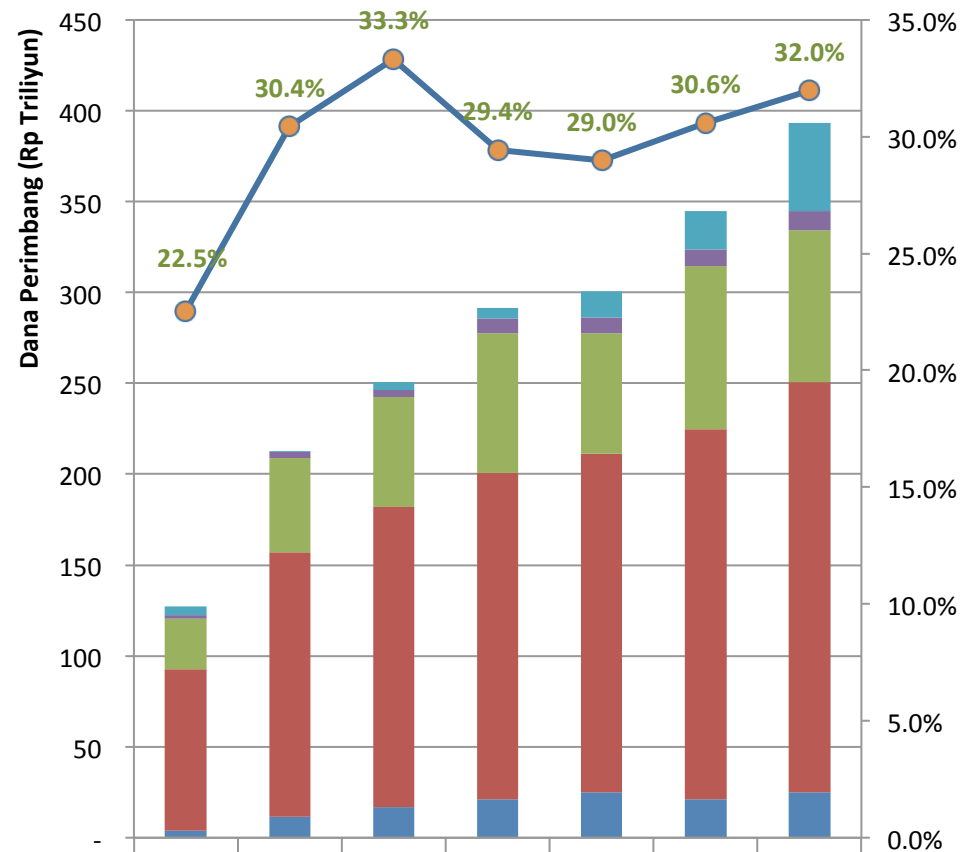
(UU 33/2004 dan UU 23/2014)



Dana Penyesuaian

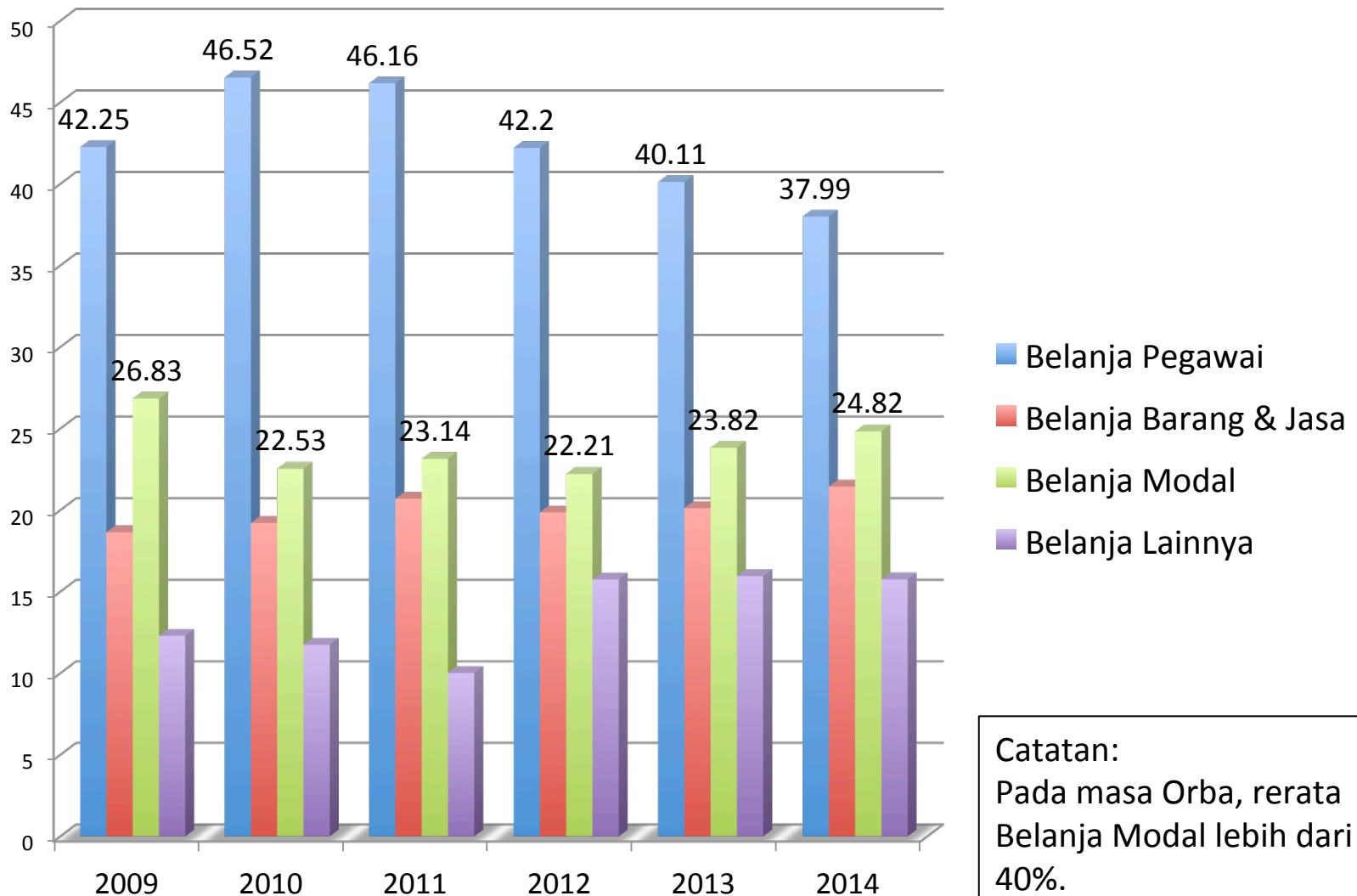
(Transfer Lainnya, per 2014) = “Gentong Babi” ?

- Alokasi dana “gentong babi” (*pork barrel*) dikritik habis-habisan oleh publik pada th 2005. Tapi DPR tetap jalan terus dg berbagai alasan.
- Pada TA 2012, Dana Penyesuaian mencapai Rp 58,4 triliun sedangkan DAK hanya Rp 26,1 triliun.
- Pada tahun 2015 justru ada wacana Dana Aspirasi. Untuk siapa?



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Dana Penyesuaian	4,703	301	4,362	5,806	14,490.0	21,150.0	48,235
Otsus	1,775	3,488	4,046	8,180	8,857	9,099.6	10,421
DBH	27,977	51,638	60,502	76,585	66,073	89,618	83,558
DAU	88,766	145,664	164,787	179,507	186,414	203,607	225,533
DAK	4,014	11,570	17,048	21,202	24,820	21,138.4	25,233
● % Dana Perimbangan Thd APBN	22.5%	30.4%	33.3%	29.4%	29.0%	30.6%	32.0%

Komposisi Belanja Daerah (%) (APBD Konsolidasi Nasional)



Catatan:
Pada masa Orba, rerata
Belanja Modal lebih dari
40%.

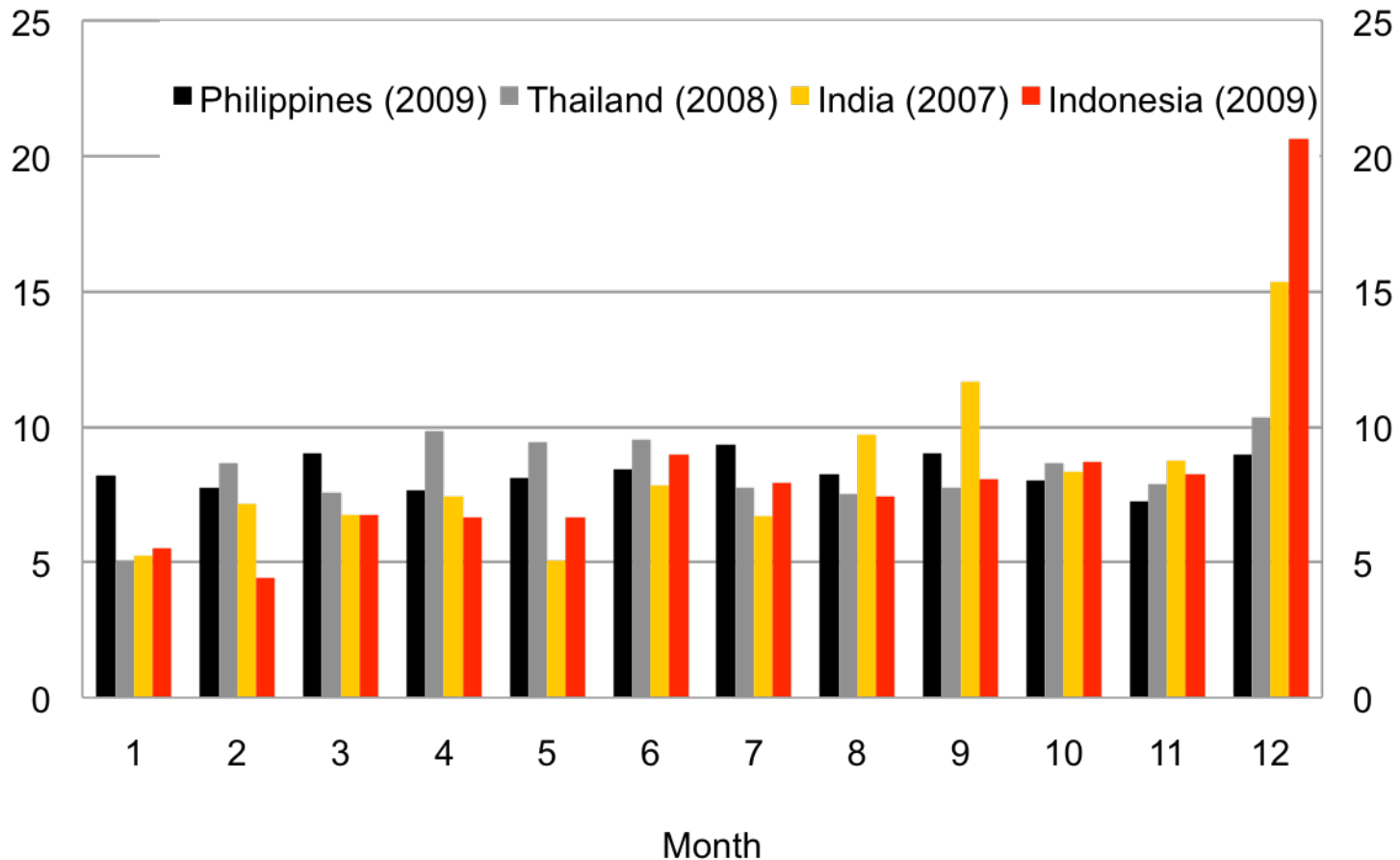
APBD 2015 Prov DIY

Uraian		Jumlah (jutaan rupiah)	% Total Belanja APBD
Total Pendapatan		3,424,276	92.64
	Pendapatan Asli Daerah	1,453,213	39.32
	Dana Perimbangan	1,046,869	28.32
	Pajak Daerah	1,296,532	35.08
	Retribusi Daerah	40,376	1.09
	Lain-lain Pendapatan	60,327	1.63
Total Belanja		3,696,265	100.00
Belanja Tidak Langsung		1,796,754	48.61
	Belanja pegawai	526,622	14.25
	Hibah	579,125	15.67
	Bantuan sosial	9,134	0.25
	Bantuan keuangan	147,414	3.99
	Belanja tidak terduga	23,000	0.62
Belanja Langsung		1,899,511	51.39
	Belanja pegawai	137,325	3.72
	Belanja barang & jasa	1,063,345	28.77
	Belanja modal	698,841	18.91
Pembiayaan Daerah		281,989	7.63
	SiLPA	281,989	7.63
	Pengeluaran	10,000	0.27
Defisit		271,989	7.36

Belanja Langsung Prov.DIY Menurut SKPD

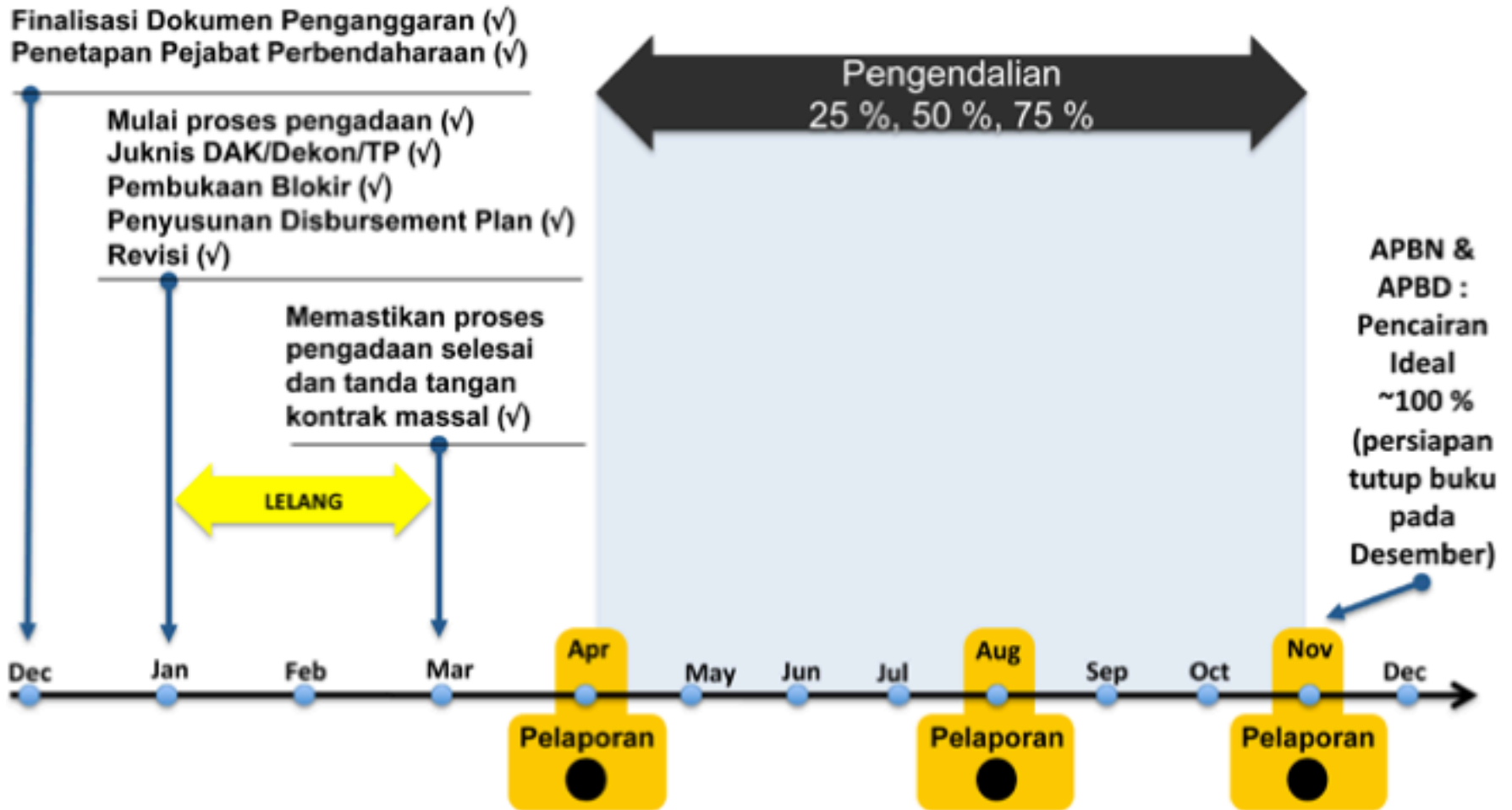
No.	SKPD	Belanja Langsung (Rp miliar)	% Total Belanja
1	Pendidikan, Pemuda & OR	183,4	10,3
2	Dinas Kesehatan	103,6	5,8
3	PU, Perumahan & ESD<	476,1	2,6
4	Bappeda	17,8	0,99
5	Perhubungan & Kominfo	112,9	6,33
6	Lingkungan Hidup	15,7	0,88
7	Pemberdayaan Perempuan	10,8	0,6
8	Sosial	41,1	2,31
9	Nakertrans	36,2	2,03
10	Perindag	20,2	1,13
11	BPKMD	13,5	0,76
12	Kebudayaan	342,5	19,22
13	Setda	80,7	4,52

Penyerapan DIPA lebih Lambat dari Negara Lain

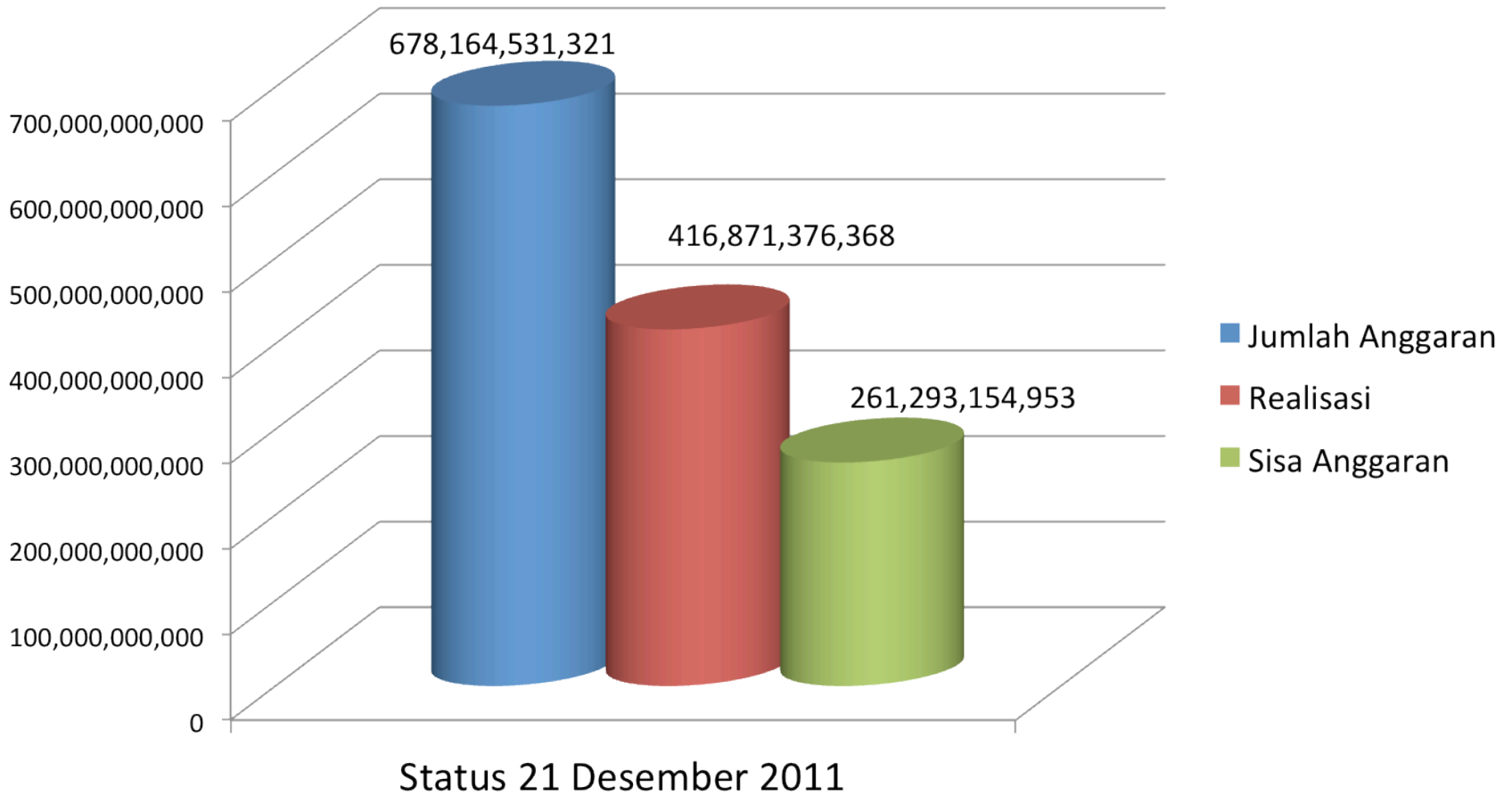


Source: CEIC, World Bank

Apakah kebijakan *debottlenecking* mulai th 2012 efektif?



Realisasi belanja APBD sangat rendah (Contoh kasus Pemprov DIY)



Sumber Data : http://intranet.jogjakarta.go.id/monev_apbd

Alokasi Belanja di Daerah Kurang Efektif

Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	% Penyelesaian Kegiatan		
		TW 1	TW 2	TW 3
215	1283	0,25	3,10	11,05
		(3 kegiatan)	(41 kegiatan)	(142 kegiatan)

Catatan Tim Monev Pemprov DIY, Th.2011 :

1. Deviasi antara target dan realisasi (fisik & keuangan) sangat lebar, deviasi keuangan tertinggi 38,95%, Deviasi Fisik tertinggi 25,69% yang keduanya terjadi pada Triwulan III.
2. Pada Triwulan 4 harus menyelesaikan 1141 kegiatan
3. Kondisi yang demikian apakah sudah cukup baik dari sisi perencanaan?

Catatan Umum Tim Monev Pemprov DIY 2012

1. Capaian Kinerja Keuangan dan Fisik sangat rendah apabila dibandingkan dengan target
2. Penyelesaian program/kegiatan cenderung “menumpuk” diakhir tahun, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya tingkat penyelesaian kegiatan sampai triwulan 3
3. Perencanaan aliran Kas yang tidak sesuai dengan karakteristik kegiatan
4. ROPK belum digunakan secara efektif sebagai alat pengendalian.

Isu Mutakhir Anggaran

1. Di tengah pelambatan pertumbuhan ekonomi (4.1%), peran anggaran publik sangat diperlukan.
2. Daya serap anggaran masih rendah. Hingga Juni 2015, baru 25% APBD terserap; Rp 255 triliun dana mengendap. Rerata serapan Dana Bansos di 12 Kementerian hanya 22 persen.
3. Sinkronisasi APBN dan APBD perlu terus ditingkatkan (Siklus, hubungan keuangan pusat-daerah)
4. Transparansi dan akuntabilitas anggaran dapat ditingkatkan dengan e-budgeting. Tetapi mengapa banyak resistensi dari legislatif?
5. Khusus DIY: Bagaimana pola penyerapan Dana Keistimewaan (Rp 547,5 T di tahun 2015)? Bagaimana memperluas pengertian Danais untuk “kebudayaan”?

Pertimbangan Strategis DPD Di Bidang Anggaran

1. Mengoptimalkan belanja infrastruktur dan subsidi bagi peningkatan kemakmuran rakyat.
2. Perbaiki siklus APBN & APBD agar serapan anggaran lebih optimal.
3. Pengendalian korupsi politis dalam anggaran; Peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
4. Peningkatan belanja modal (*capital spending*). Penajaman prioritas dalam APBD di berbagai daerah.

- Sebagai “Senat” atau perwakilan dari Daerah, DPD perlu penguatan profesionalisme, komitmen, integritas, dan perubahan pola-pikir.
- Mengingat masih rendahnya daya-dorong anggaran publik (APBN & APBD) bagi kemakmuran rakyat, peran DPD perlu dioptimalkan dengan memperkuat pemahaman atas substansi anggaran.

TERIMA KASIH